



**RINGKASAN  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
TAHUN 2023  
KABUPATEN JENEPONTO**





## II. PENDAHULUAN

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jeneponto Tahun 2023 merupakan implementasi dari amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD maka pemerintah daerah wajib melakukan evaluasi tentang pelaksanaan RKPD setiap tahunnya. Baik RPJPD, RPJMD/RPD dan RKPD ketiga dokumen tersebut disusun saling bersinergis dengan tujuan untuk mengarahkan pembangunan daerah supaya lebih terfokus pada pencapaian target yang sudah ditentukan secara tertulis. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, antara sebagai berikut:

1. RKPD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD ke dalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah.
2. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Kerja PD (Renja PD).
3. RKPD merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD dan penentuan prioritas serta pagu anggaran sementara yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
4. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.

## II. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Jeneponto pada Tahun 2023 secara periodik dan normatif merupakan prioritas pembangunan pada tahun ke lima RPJMD Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2023. Perumusan sasaran dan prioritas pembangunan RKPD Kabupaten Jeneponto tahun 2023 selain berpijak pada beberapa ketentuan di atas, juga mengacu pada data permasalahan pembangunan daerah, isu-isu strategis serta disinkronkan dengan Prioritas Nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023. Hal ini dimaksudkan agar sasaran dan prioritas pembangunan RKPD Kabupaten Jeneponto tahun 2023 relevan dengan tujuan pembangunan.



Prioritas pembangunan daerah adalah tema atau agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi tonggak capaian antara menuju sasaran 5 (lima) tahunan RPJMD. Suatu prioritas pembangunan daerah pada dasarnya meliputi program program unggulan Perangkat Daerah (PD) yang paling tinggi kontribusinya terhadap pencapaian target sasaran pembangunan.

Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Tahun 2018 – 2023 adalah :

**“JENEPONTO SMART 2023”**  
(BerdayaSaing, MAju, Religius dan BerkelanjuTan)

Dalam rumusan visi tersebut terdapat beberapa kata kunci sebagai pokok-pokok visi yaitu “SMART” yang merupakan akronim dari BERDAYA SAING, MAJU, RELIGIUS DAN BERKELANJUTAN. Penjelasan dari pokok-pokok visi adalah sebagai berikut:

<b>Visi: Jeneponto SMART</b> <b>(berdayaSaing, MAju, Religius dan BerkelanjuTan)</b>		
<b>Visi</b>	<b>Pokok-Pokok Visi</b>	<b>Penjelasan Visi</b>
<b>“JENEPONTO SMART 2023”</b>  (berdayaSaing, MAju, Religius dan BerkelanjuTan)	Jeneponto Smart	Secara utuh “Jeneponto Smart” dapat dimaknai sebagai suatu konsep dan strategi pembangunan perkotaan kekinian yang kita kenal dengan “smart city/smart regency” yang akan ditransformasikan menjadi konsep pembangunan Kabupaten Jeneponto sesuai dengan kondisi dan lingkungan strategis daerah. Smart regency kita maknai sebagai kabupaten yang mampu mengelola sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya lainnya sehingga warganya mampu hidup nyaman aman dan berkelanjutan dengan berbasis ICT.
	Jeneponto SMART sebagai akronim dari Berdaya Saing, Maju, Religius dan Berkelanjutan	Dapat dimaknai sebagai kondisi dan tatanan pembangunan yang ingin kita wujudkan secara bersama-sama di akhir periode 2018-2023, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Berdaya Saing</li> <li>• Maju</li> <li>• Religius, dan</li> <li>• Berkelanjutan</li> </ul>
	Berdaya saing	Dapat dimaknai sebagai kondisi dan tatanan pembangunan yang ingin kita wujudkan pada akhir periode kepemimpinan 2018-2023 dengan cara meningkatkan perekonomian untuk mencapai peningkatan kualitas hidup masyarakat (sejahtera) pada taraf yang baik dan berkelanjutan melalui pemetaan secara cermat dan pemberdayaan potensi-potensi daerah (khususnya potensi unggulan) sehingga memiliki nilai saing yang tinggi di tingkat regional dan domestik. Hal ini ditandai dengan, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya kemampuan ekonomi daerah dan penurunan kemiskinan</li> <li>• Meningkatnya infrastruktur wilayah</li> <li>• Meningkatnya investasi di daerah</li> <li>• Meningkatnya kualitas SDM</li> </ul>



<b>Visi: Jeneponto SMART (berdayaSaing, MAju, Religius dan BerkelanjuTan)</b>		
<b>Visi</b>	<b>Pokok-Pokok Visi</b>	<b>Penjelasan Visi</b>
	Maju	Dapat dimaknasi sebagai kondisi dan tatanan pembangunan yang ingin kita wujudkan pada akhir periode kepemimpinan 2018-2023 dengan cara meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan. Hal ini ditandai dengan, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keluar dari status daerah tertinggal</li> <li>• Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan publik khususnya pelayanan dasar dengan berbasis TIK</li> <li>• Meningkatnya positive image daerah dengan prestasi-prestasi masyarakat dan ASN</li> <li>• Meningkatnya inovasi-inovasi daerah termasuk masyarakat</li> </ul>
	Religius	Dapat dimaknasi sebagai kondisi dan tatanan pembangunan yang ingin kita wujudkan pada akhir periode kepemimpinan 2018-2023 dengan meningkatkan pemahaman dan pengamalan terhadap nilai-nilai keagamaan khususnya agama Islam serta pembinaan bagi warga masyarakat dan ASN baik secara formal maupun secara informal. Hal ini ditandai dengan, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya prestasi-prestasi masyarakat dan ASN dalam bidang keagamaan</li> <li>• Meningkatnya syiar-syiar keagamaan dan toleransi beragama</li> <li>• Terciptanya birokrasi yang beradab</li> <li>• Meningkatnya ketentraman hidup masyarakat</li> </ul>
	Berkelanjutan	Dapat dimaknasi sebagai kondisi dan tatanan pembangunan yang ingin kita wujudkan pada akhir periode kepemimpinan 2018-2023 dengan dua pendekatan, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melanjutkan pembangunan yang telah dilaksanakan dan dicapai pada periode sebelumnya, ditandai dengan, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya kesinambungan pembangunan dari periode sebelumnya</li> <li>• Meningkatnya outcome pembangunan dari periode sebelumnya</li> </ul> </li> <li>2. Menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta regulasi-regulasi daerah, ditandai dengan meningkatnya capaian indikator-indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB_ sesuai kewenangan daerah sebagai bagian integral dari komitmen nasional dalam pencapaian <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs)</li> </ol>

Sumber data : Perubahan RPJMD Kabupaten Jeneponto tahun 2018-2023



Dengan memperhatikan seluruh aspek, potensi dan dinamika di Kabupaten Jeneponto dan sebagai penjabaran dari Visi, maka ditetapkan Misi pembangunan Kabupaten Jeneponto 2018 – 2023 sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia;
2. Mewujudkan peradaban birokrasi melalui tata kelola pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan;
3. Mengoptimalkan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan;
4. Melaksanakan pengembangan wilayah dan pembangunan infrastruktur wilayah secara merata;
5. Meningkatkan perekonomian daerah melalui pengelolaan sumber daya daerah dan investasi yang berkeadilan;
6. Meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produktif, transparan dan akuntabel;
7. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan nilai-nilai budaya;
8. Menegakkan supremasi hukum, keamanan dan ketertiban.

**Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi  
Kabupaten Jeneponto Tahun 2023**

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
<b>VISI “JENEPONTO SMART 2023” (Berdaya Saing, MAju, Religius dan BerkelanjuTan)</b>		
<b>Misi 1: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia</b>		
Meningkatkan kualitas manusia	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatkan Prasarana dan sarana Pelayanan kesehatan dan ketersediaan tenaga kesehatan profesional yang ditunjang dengan TIK
	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Meningkatkan akses dan Pemenuhan Standar Pendidikan pada pendidikan PAUD dan Pendidikan kesetaraan yang ditunjang dengan TIK
	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Menciptakan iklim usaha perekonomian dan Meningkatkan Lifeskill masyarakat
	Meningkatnya Pemberdayaan Gender	Meningkatkan kapasitas dan Peran Perempuan dalam pembangunan dan perolehan manfaat dari pembangunan
<b>Misi 2: Mewujudkan Peradaban Birokrasi Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan Transparan</b>		
Meningkatkan kinerja birokrasi dan pelayanan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Meningkatkan Kapabilitas dan integritas Aparatur dalam pelayanan, Perencanaan,



<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>
publik	Meningkatnya kualitas pelayanan dasar dan pelayanan publik lainnya	Pelaksanaan dan Evaluasi Pembangunan melalui optimalisasi pemanfaatan Teknologi, Informasi, Komunikasi dan Inovasi
<b>Misi 3: Mengoptimalkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan</b>		
Meningkatkan kualitas tata kelola lingkungan hidup yang baik dan berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Air	Mengintegrasikan upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta penguatan kelembagaan dan penegakan hukum
	Meningkatnya Kualitas Udara	
	Meningkatnya Kualitas Vegetasi Lahan	
<b>Misi 4: Melaksanakan Pengembangan Wilayah dan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Secara Merata</b>		
Menurunnya Tingkat Disparitas Ekonomi Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Meningkatkan Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Meningkatnya kualitas dan jangkauan infrastruktur wilayah	Meningkatkan pembangunan dan pemerataan infrastruktur wilayah
<b>Misi 5: Meningkatkan Perekonomian Daerah Melalui Pengelolaan Sumber Daya Daerah dan Investasi Yang Berkeadilan</b>		
Meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya perekonomian daerah	Meningkatnya Penduduk diatas garis kemiskinan	Meningkatkan tata kelola bantuan sosial untuk menurunkan beban pengeluaran dan mengembangkan usaha ekonomi produktif untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin dan rentan.
	Meningkatnya jumlah penduduk yang produktif	Mengembangkan sektor ekonomi basis atau potensial daerah dengan pendekatan hilirisasi dan Inovasi yang ditunjang dengan TIK dan Peningkatan layanan investasi
	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	Melakukan Fasilitasi dan pembinaan usaha dan UMKM
<b>Misi 6: Meningkatkan Tata Kelola Keuangan Daerah Yang Efektif, Efesien, Produktif, Transparan dan Akuntabel</b>		
Meningkatnya Kualitas kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan dan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Daerah	Meningkatkan manajemen pemerintahan yang bersih dan akuntabel dengan penguatan kualitas dan kapasitas SDM birokrasi dan aparatur pengelola keuangan daerah
	Meningkatnya Produktivitas Pendapatan Asli Daerah	Meningkatkan kapasitas SDM dalam pengelolaan keuangan daerah dan PAD dan intensifikasi serta ekstensifikasi PAD yang didukung dengan penerapan sistem berbasis TIK dan inovasi





TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
<b>Misi 7: Menegakkan Supremasi Hukum, Keamanan dan Ketertiban</b>		
Meningkatkan Pemahaman dan pengamalan terhadap nilai-nilai agama dan budaya	Tercegahnya Konflik SARA	Meningkatkan pendidikan karakter dan toleransi beragama dan pembinaan organisasi kerukunan masyarakat serta mitigasi konflik SARA
<b>Misi 8: Menegakkan Supremasi Hukum, Keamanan dan Ketertiban</b>		
Meningkatkan ketertiban dan ketentraman masyarakat	Meningkatnya penegakan norma kehidupan dalam masyarakat	Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan nilai-nilai budaya

Sumber data : Perubahan RPJMD Kabupaten Jeneponto tahun 2018-2023

### **Hubungan RKP, RKPD Provinsi Sulawesi Selatan dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Jeneponto Tahun 2023**

Dalam penyusunan Prioritas Pembangunan RKPD Kabupaten Jeneponto Tahun 2023 digunakan sejumlah dokumen perencanaan yang ada di tingkat Nasional maupun Provinsi, dengan keterkaitan/hubungan sebagai berikut:

NASIONAL	PROVINSI	KABUPATEN JENEPONTO
<b>TEMA PEMBANGUNAN TAHUN 2023</b>		
Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Pemantapan Kesejahteraan Melalui Pembangunan Manusia Yang Produktif dan Berkarakter	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Daya Saing Daerah Melalui Penguatan SDM dan Ekonomi Daerah Yang Inovatif
<b>PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2023</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;</li> <li>2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;</li> <li>3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;</li> <li>4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;</li> <li>5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;</li> <li>6. Membangun lingkungan hidup meningkatkan ketahanan bencana dan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan public;</li> <li>2. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan public;</li> <li>3. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan public;</li> <li>4. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan public;</li> <li>5. Pembangunan manusia;</li> <li>6. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas; dan</li> <li>7. Pelestarian lingkungan hidup.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kualitas SDM dan Penurunan Angka Kemiskinan;</li> <li>2. Peningkatan Pelayanan Publik;</li> <li>3. Peningkatan Pembangunan Lingkungan Hidup secara Berkelanjutan;</li> <li>4. Peningkatan pembangunan infrastruktur (khususnya infrastruktur dasar dan pengembangan wilayah);</li> <li>5. Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi;</li> <li>6. Peningkatan Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat.</li> </ol>



NASIONAL	PROVINSI	KABUPATEN JENEPONTO
perubahan iklim; 7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik		

Sumber data : RKPD Kabupaten Jeneponto tahun 2023

### III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

#### Realisasi Tahun 2020-2021 dan Target Pendapatan Daerah Kabupaten Jeneponto 2023 dan Proyeksi Tahun 2024

Kode	Uraian	Realisasi		Target APBD 2022	Tahun Rencana 2023	Proyeksi 1 Tahun Setelah Tahun Rencana Tahun 2024
		2020	2021			
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>					
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>109.189.130.564</b>	<b>99.135.638.002</b>	<b>118.124.713.616</b>	<b>111.680.009.735</b>	<b>135.524.197.712</b>
4.1.01	Pajak Daerah	16.248.762.931	18.960.571.735	20.825.000.000	20.520.000.000	20.170.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	60.673.173.913	55.033.871.462	15.884.313.616	11.259.009.735	12.155.313.616
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	4.304.376.523	5.319.393.002	5.300.000.000	6.000.000.000	5.300.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang sah	27.962.817.197	19.821.801.803	76.115.400.000	73.901.000.000	97.898.884.096
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.096.546.009.015</b>	<b>1.047.488.278.749</b>	<b>1.015.990.975.000</b>	<b>1.011.382.255.000</b>	<b>1.011.382.255.000</b>
<b>4.2.01</b>	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>1.001.443.343.348</b>	<b>997.581.051.384</b>	<b>947.157.615.000</b>	<b>947.157.615.000</b>	<b>947.157.615.000</b>
<b>4.2.01.01</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>879.982.930.648</b>	<b>891.650.696.241</b>	<b>853.228.455.000</b>	<b>853.228.455.000</b>	<b>853.228.455.000</b>
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	18.114.248.687	25.458.586.118	17.282.446.000	17.282.446.000	17.282.446.000
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	613.992.950.000	604.718.144.000	604.867.921.000	604.867.921.000	604.867.921.000
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	122.885.308.357	137.962.472.559	109.171.583.000	109.171.583.000	109.171.583.000
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	124.990.423.604	123.511.493.564	121.906.505.000	121.906.505.000	121.906.505.000
4.2.01.04	Dana Insentif Daerah	15.633.258.000	-	-	-	-
4.2.01.05	Dana Desa	105.827.154.700	105.930.355.143	93.929.160.000	93.929.160.000	93.929.160.000
<b>4.2.02</b>	<b>Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>	<b>95.102.665.667</b>	<b>49.907.227.365</b>	<b>68.833.360.000</b>	<b>64.224.640.000</b>	<b>64.224.640.000</b>
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	47.107.378.467	44.585.126.365	58.363.600.000	55.063.600.000	55.063.600.000
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	47.995.287.200	5.322.101.000	10.469.760.000	9.161.040.000	9.161.040.000
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>50.333.970.000</b>	<b>75.622.448.430</b>	<b>76.069.784.096</b>	<b>76.069.784.096</b>	<b>76.064.784.096</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	34.116.000	19.040.835.700	55.000.000	55.000.000	50.000.000
4.3.02	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	50.299.854.000	56.581.612.730	76.014.784.096	76.014.784.096	76.014.784.096
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.256.069.109.579</b>	<b>1.222.246.365.181</b>	<b>1.210.185.472.712</b>	<b>1.199.132.048.831</b>	<b>1.222.971.236.808</b>

Sumber data : RKPD Kabupaten Jeneponto tahun 2023

#### Realisasi Tahun 2020-2021 dan Target Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2023 dan Proyeksi Tahun 2024

Kode	Uraian	Realisasi Belanja		Alokasi Belanja 2022	Alokasi Belanja Tahun Rencana 2023	Proyeksi 1 Tahun Setelah Tahun Rencana Tahun 2024
		2020	2021			
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>					
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>859.688.150.311</b>	<b>889.028.217.971</b>	<b>911.375.262.416</b>	<b>916.758.214.277</b>	<b>916.758.214.277</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	523.416.265.116	507.847.416.020	527.856.901.390	529.558.518.389	529.558.518.389
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	323.342.566.513	314.242.137.286	366.576.990.120	370.975.115.982	370.975.115.982
5.1.05	Belanja Hibah	12.779.318.682	65.938.664.665	15.941.370.906	15.224.579.906	15.224.579.906
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	150.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>225.366.706.847</b>	<b>156.263.393.825</b>	<b>132.096.957.696</b>	<b>117.098.636.854</b>	<b>117.098.636.854</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	4.645.173.000	297.954.982	115.000.000	27.000.000	27.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan mesin	44.373.208.938	43.299.563.229	30.793.372.450	19.090.357.850	19.090.357.850
5.2.03	Belanja Modal gedung dan Bangunan	57.558.959.540	57.445.323.907	29.369.984.436	32.198.568.346	32.198.568.346





Kode	Uraian	Realisasi Belanja		Alokasi Belanja 2022	Alokasi Belanja Tahun Rencana 2023	Proyeksi 1 Tahun Setelah Tahun Rencana Tahun 2024
		2020	2021			
5.2.04	Belanja Modal, Jalan Jaringan dan irigasi	114.963.086.337	54.805.101.707	65.774.280.810	61.950.995.258	61.950.995.258
5.2.05	Belanja Modal Aset tetap Lainnya	3.826.279.032	415.450.000	6.044.320.000	2.831.715.400	2.831.715.400
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-	1.000.000.000	1.000.000.000
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>9.027.921.850</b>	<b>1.890.780.510</b>	<b>8.800.000.000</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>5.000.000.000</b>
5.3.01	Belanja Tidak terduga	9.027.921.850	1.890.780.510	8.800.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>170.394.653.926</b>	<b>166.529.162.287</b>	<b>158.913.252.600</b>	<b>158.775.197.700</b>	<b>158.775.197.700</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.726.235.033	2.513.773.044	2.789.055.900	2.651.001.000	2.651.001.000
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	167.668.418.893	164.015.389.243	156.124.196.700	156.124.196.700	156.124.196.700
<b>JUMLAH</b>		<b>1.264.477.432.934</b>	<b>1.213.711.554.593</b>	<b>1.211.185.472.712</b>	<b>1.197.632.048.831</b>	<b>1.197.632.048.831</b>

Sumber data : RKPD Kabupaten Jeneponto tahun 2023

### Realisasi Tahun 2020-2021 dan Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2023 dan Proyeksi Tahun 2024

Kode	Uraian	Realisasi		Alokasi 2022	Alokasi Tahun Rencana 2023	Proyeksi 1 Tahun Setelah Tahun Rencana Tahun 2024
		2020	2021			
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>					
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>52.415.267.361</b>	<b>40.689.173.967</b>	<b>2.500.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	52.415.267.361	40.689.173.967	2.500.000.000	-	-
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>2.500.000.000</b>	<b>2.500.000.000</b>	<b>1.500.000.000</b>	<b>1.500.000.000</b>	<b>1.500.000.000</b>
6.2.02	Penyertaan Modal	2.500.000.000	2.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000

Sumber data : RKPD Kabupaten Jeneponto tahun 2023

#### IV. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto periode 2018-2023 yang ditetapkan menjadi Indikator Makro Pembangunan, Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

##### A. Indikator Makro Pembangunan

Indikator makro pembangunan merupakan indikator kinerja pembangunan yang menggambarkan keberhasilan pembangunan daerah secara umum. Pencapaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Kinerja makro merupakan akumulasi dari pencapaian kinerja beberapa sektor, urusan, dan bidang pemerintahan. Adapun indikator makro pembangunan terdiri dari:

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)



2. Tingkat Kemiskinan
3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
4. Pertumbuhan Ekonomi
5. PDRB Perkapita ADHB
6. Rasio Gini

**Capaian dan Target Indikator Makro  
Kabupaten Jeneponto Tahun 2021 - 2023**

No	Indikator Kinerja Makro	Satuan	Capaian Tahun 2021	Asumsi Capaian Tahun 2022	Target P-RPJMD Tahun 2023	Target Tahun 2023
1	Indeks Pembangunan Manusia	Angka/Nilai	64.56	64.90	65.38	65.67
2	Tingkat Kemiskinan	%	14.28	13.17	12.16	12.84
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	2.38	2.24	2.21	1.86
4	Pertumbuhan Ekonomi	%	5.40	4.48- 5.97	4.68 - 6.23	5.66 - 6.48
5	PDRB Perkapita ADHB	Juta Rp	27.26	31.66	32.89	32.89
6	Rasio Gini	Angka	0.353	0.335	0.328	0.321

Sumber Data: RPJMD Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2023

**B. Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah oleh Kepala Daerah. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator tujuan dan sasaran daerah. Pencapaian indikator tujuan dan sasaran tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program. Penetapan indikator kinerja utama selanjutnya disajikan pada table berikut ini:

**Capaian dan Target Indikator Kinerja Utama  
Kabupaten Jeneponto Tahun 2021 - 2023**

No	Indikator	Satuan	Tahun 2021		Asumsi Capaian 2022	Target Tahun 2023
			Target	Capaian		
1	2	3	6		7	8
1	Indeks Pembangunan Manusia	Point	64,52	64,56	64,90	65,67
2	Indeks Pembangunan Gender	Point	92,07	91,60	92,35	92,57
3	Indeks Kesehatan	Point	71,59	71,52	71,84	72,12
4	Indeks Pendidikan	Point	55,62		56,05	56,53
5	Indeks Daya Beli	Point	67,42	67,64	67,54	67,66
6	Indeks Pemberdayaan Gender	Point	68,19	68,68	68,26	68,35
7	Indeks Reformasi Birokrasi	Point	B	C	B	B
8	Nilai SAKIP	Nilai	B	B	BB	BB



No	Indikator	Satuan	Tahun 2021		Asumsi Capaian 2022	Target Tahun 2023
			Target	Capaian		
9	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	B	B	B	B
10	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Point	NA	61,95	55,93	56,02
11	Indeks Kualitas Air	Point	4,7	5,0	4,8	4,9
12	Indeks Kualitas Udara	Point	85,74	91,8	85,75	85,76
13	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Point	77,17	27,26	77,23	77,39
14	Indeks Gini	Point	0,342	0,353	0,335	0,321
15	Persentase Kawasan Kumuh yang tertangani	Persen	6	0,49	5,5	5
16	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani		0,13	0,19	0,17	0,19
17	Indeks jangkauan Infrastruktur Wilayah	Point	65,42	80,662	65,46	65,51
18	Persentase Pertumbuhan Ekonomi	Persen	3,70 - 4,93	5,40	4,48 - 5,97	5,66 - 6,48
19	Persentase penduduk Miskin	Persen	14,14	14,28	13,17	12,84
20	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	2,29	2,38	2,24	1,86
21	Pendapatan Perkapita	Rp.	28.750.000	27.260.000	31.660.000	32.890.000
22	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai	B	B*	B	B
23	Opini BPK	Nilai	WTP	WDP	WTP	WTP
24	Persentase PAD terhadap PDRB	Persen	1,22	1,40	1,11	1,04
25	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Point	80 - 90	85	80 - 90	80 - 90
26	Tingkat Terjadinya Konflik Sara	Kejadian	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi
27	Persentase Angka Kriminal yang tertangani	Persen	85	90	90	95
28	Persentase K3 yang tertangani	Persen	100	100	100	100

Sumber Data: RPJMD Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2023

### C. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan indikator yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada masa jabatan pemerintah daerah. Indikator Kinerja Kunci disusun sesuai dengan urusan penyelenggaraan pemerintah dan kewenangan pemerintah Daerah. Penetapan indikator kinerja kunci selanjutnya disajikan pada tabel Berikut:

#### Target Indikator Kinerja dan Realisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2021-2023

NO	Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Asumsi Capaian Tahun 2022	Target Tahun 2023
			2021	2021		



NO	Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Asumsi Capaian Tahun 2022	Target Tahun 2023
			2021	2021		
<b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>						
1	Pertumbuhan PDRB	Point	3,70 - 4,93	5,4	4,48 - 5,97	5,66 - 6,48
2	Laju Inflasi	%	< 4	0,51	< 4	< 4
3	PDRB per kapita (Dalam Juta Rp)	Juta Rp.	30.35	27,26	31.66	32.89
4	Indeks Gini	Point	0,342	0,353	0,335	0,321
5	Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan	%	85,86	85,72	86,83	87,16
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Point	64,52	64,56	64,9	65,67
7	Angka Melek Huruf	%	95,29	80,56	95,29	95,29
8	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	6.86	6,6	7.05	7.24
9	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	66,54	66,49	66,69	66,84
10	Persentase Balita Gizi Buruk	%	100	198,92	100	100
11	Prevalensi Balita Gizi Kurang	%	4,83	126,73	4,83	4,83
12	Cakupan Desa Siaga Aktif	%	100	66,37	100	100
14	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,29	2,38	2,24	1,86
15	Rasio Penduduk Yang Bekerja	%	92,69	65,79	92,69	92,69
16	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	Point	96,97	0,11	96,97	96,97
17	Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga Terhadap Total Kesempatan Kerja	%	14,29	6,87	14,29	14,29
18	Persentasetase PAD terhadap pendapatan	%	11,26	114,75	10,66	10,66
19	Opini BPK	Nilai	WTP	WDP	WTP	WTP
20	Produksi Sektor Pertanian	Ton	623.554,15	690.341,70	635.769,27	648.228,15
21	Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB	%	7,6	8,12	7,7	7,8
22	Produksi Sektor Perkebunan	Ton	11.089,88	3.302,85	11.192,78	11.296,71
23	Kontribusi Produksi Kelompok Petani terhadap PDRB	%	62,3	62,2	65,47	68,64
24	Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB	%	9,14	11,02	9,24	9,25
25	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	%	3,4	11,02	3,29	3,39
26	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	B	B	B	B
<b>ASPEK DAYA SAING DAERAH</b>						
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita (ADHB)	Rp.	7.694.000,4 1	7.166.227, 18	8.249.000, 05	8.786.000, 39
2	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita (ADHK)	Rp.	4.451.000,5 2	4.024.385, 83	4.670.000, 94	4.899.000, 77
3	Nilai Tukar Petani	Point	103,05	100,74	103,05	103,05



NO	Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Asumsi Capaian Tahun 2022	Target Tahun 2023
			2021	2021		
4	Pengeluaran Konsumsi Non-Pangan Rumah Tangga Per Kapita	Rp.				
5	Persentase Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa	%	28,32	NA	28,32	28,32
6	Angka Kriminalitas Yang Tertangani	%	100	0,23	100	100
7	Rasio Ketergantungan	%	58,18	NA	58,18	58,18
<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>						
<b>1</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>					
<b>1.01</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>					
1	Angka Harapan lama sekolah	Tahun	12	12.10	12	12
2	Angka Melanjutkan SD/MI	%	85.71	98	86.71	87.71
3	Angka Melanjutkan SMP/MTs	%	74.91	96,04	76.91	78.91
4	Angka melek huruf	%	100	80,56	100	100
5	Angka Putus Sekolah SD/MI	%	3	NA	2	1
6	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	%	2	NA	2	1
7	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	7.46	6.60	7.66	7.86
8	APK SD/MI	%	100	117,67	100	100
9	APM SD/MI	%	100	99,44	100	100
10	APM SMP/MTs	%	100	66,63	100	100
11	APK SMP/MTs	%	100	70,99	100	100
12	Persentase angka partisipasi kasar PAUD (3-6 tahun)	%	100	47.75	100	100
13	Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	%	100	59,73	100	100
14	Persentase Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	%	100	100	100	100
15	Persentase Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan	%	100	2.54	100	100
16	Persentase Sekolah yang menerapkan kurikulum sesuai ketentuan yang berlaku	%	100	100	100	100
17	Persentase Pemerataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Jenjang Pendidikan SD dan Sederajat Perwilayah	%	100	81.01	100	100
18	Persentase Pemerataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Jenjang Pendidikan SMP dan Sederajat Perwilayah	%	100	99.92	100	100



NO	Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Asumsi Capaian Tahun 2022	Target Tahun 2023
			2021	2021		
<b>1.02</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>					
1	Akreditasi Puskesmas	Predikat	A	84,21	A	A
2	Akreditasi RSUD	Predikat	Paripurna	Utama	Paripurna	Paripurna
3	Cak Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	%	87.35	100	97.75	100
4	Cakupan balita (0 - 59 bulan) yang mendapat pelayanan kesehatan balita sehat sesuai standar	%	100	79,54	100	100
5	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	%	100	100	100	100
6	Cakupan Balita Pneumonia Yang Ditangani	%	84.66	12,03	93.92	95
7	Cakupan Ketersediaan Fasilitas Kesehatan yang sesuai standar	%	100	100	100	100
8	Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani	%	80	128,52	80	85
9	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan	%	100	100	100	100
10	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	%	100	58,11	100	100
11	Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	%	100	99,27	100	100
12	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (K4) sesuai standar	%	100	79,72	100	100
13	Cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar.	%	100	75,68	100	100
14	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	%	100	4,25	100	100
15	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	%	97.4	101,92	97.6	98
16	Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	93	71,37	93	95
17	Penderita Diare Yang Ditangani	%	100	34,19	100	100
18	Persentase Anak Usia 1 Tahun Yang Diimunisasi Campak	%	98.33	65,8	98.5	98.67
19	Persentase jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	%	100	95,97	100	100
20	Persentase Kelompok Pekerja Informal yang Melaksanakan Upaya Kesehatan Kerja (UKK)	%	100	100	100	100
21	Persentase Ketersediaan Obat, Vaksin dan Alkes di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	%	79	82,24	79	85





NO	Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Asumsi Capaian Tahun 2022	Target Tahun 2023
			2021	2021		
22	Persentase Kualitas Air Minum yang Memenuhi Syarat Kesehatan	%	100	58,07	100	100
23	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	42,47	100	100
24	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100	86,27	100	100
25	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100	100	100	100
26	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100
27	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	68,98	100	100
28	Persentase Pengunjung Berusia 60 Tahun keatas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	62,41	100	100
29	Persentase pengunjung usia 15-59 tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	61,55	100	100
30	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang sesuai standar	%	100	50	100	100
31	Persentase Sarana Distribusi dan Produksi Obat, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman sesuai Standar	%	100	100	100	100
32	Persentase Desa dan Kelurahan Siaga Aktif	%	85	95,58	95	100
<b>1.03</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>					
1	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	69,96	66,93	72,08	74,39
2	Persentase kawasan Permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur banjir dalam kewenangan kabupaten	%	80	2,39	90	100
3	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga (SPM)	%	100	71,08	100	100
4	Persentase Kinerja penyediaan pelayanan SPALD-S akses aman (SPM)	%	100	11,89	100	100



NO	Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Asumsi Capaian Tahun 2022	Target Tahun 2023
			2021	2021		
5	Persentase Kinerja penyediaan pelayanan SPALD-S akses dasar (SPM)	%	100	96,51	100	100
6	Persentase Drainase sekunder yang berfungsi dengan baik	%	85	80.69	85	85
7	Presentase bangunan gedung dan lingkungan yang dibangun dan dipelihara yang berfungsi dengan baik	%	90	54.72	90	90
8	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	%	61,34	77,16	66,9	72,46
9	persentase tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	100	100	100	100
10	Persentase ketersediaan data dan informasi jasa konstruksi	%	100	100	100	100
11	Persentase proyek yang menjadi kewenangan pengasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	100	100	100	100
12	Ketaatan Terhadap RTRW	%	59	NA	61	65
13	Luasan RTH Publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	%	58,77	15	59,18	59,59
14	Persentase ketersediaan Dokumen Tata Ruang yang telah ditetapkan	%	0,25	25	0,5	0,75
<b>1.04</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>					
1	Persentase Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan yang dilaksanakan	%	100	100	100	100
2	Persentase Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100	100	100	100
3	Persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	100	100	100	100
4	Persentase Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	%	100	100	100	100
5	Persentase Penyelenggaraan Peningkatan kualitas Perumahan & Kawasan Permukiman	%	100	100	100	100
6	Persentase Penyelenggaraan Peningkatan kualitas Prasarana Sarana Utilitas Umum	%	100	100	100	100



NO	Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Asumsi Capaian Tahun 2022	Target Tahun 2023
			2021	2021		
<b>1.05</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>					
1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	%	100	100	100	100
2	Persentase Penegakan PERDA	%	97,12	91,53	98,12	99,12
3	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	%	100	91,53	100	100
4	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan)	%	97,12	88,57	98,12	99,12
5	Persentase Penanggulangan Bencana	%	100	100	100	100
6	Persentase Penanggulangan Bencana	%	100	100	100	100
7	Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Pada Kondisi Membahayakan Manusia (Operasi Darurat Non kebakaran)	%	100	100	100	100
8	Persentase Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran (Balakar, Satlakar, dan atau komunitas masyarakat lainnya) yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan	%	100	NA	100	100
9	Persentase Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi	%	100	69,23	100	100
10	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Menit	05-10	39,68	05-10	05-10
<b>1.06</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>					
1	Persentase PSKS yang meningkat kemampuannya	%	20	58,75	30	40
4	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi Kebutuhan dasarnya diluar panti	%	100	50,39	100	100
5	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	%	100	67,11	100	100
6	Persentase Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti (SPM)	%	100	NA	100	100
7	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	%	100	78,6	100	100



NO	Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Asumsi Capaian Tahun 2022	Target Tahun 2023
			2021	2021		
8	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial serta fakir miskin lainnya yang telah menerima jaminan social	%	30	93,75	35	40
9	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	23,16	22,84	30	35
10	Persentase Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota (SPM)	%	100	100	100	100
11	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%	100	100	100	100
12	Persentase Taman Makam Pahlawan yang terpelihara	%	100	100	100	100
<b>2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>					
<b>2.07</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>					
1	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	0,31	75,1	0,31	0,31
2	Persentase kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun keatas	%	0,023	0,11	0,027	0,032
3	Cakupan Pelaksanaan perlindungan, keselamatan kerja dan pengembangan lembaga TK	%	0,06	64,29	0,09	0,09
<b>2.08</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>					
1	Persentase Parsitipasi Perempuan Di lembaga Pemerintah Daerah	%	21	17,27	21	21
2	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta	%	30	0,54	30	30
3	Proporsi Kursi yang diduduki Perempuan di DPR	%	20	20	20	20
4	Cakupan Layanan pemulihan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	100	100	100	100
5	Cakupan Layanan Reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	100	100	100	100
6	Cakupan Perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	100	100	100	100



NO	Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Asumsi Capaian Tahun 2022	Target Tahun 2023
			2021	2021		
7	Cakupan Perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan Pendampingan	%	100	100	100	100
8	Cakupan Perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan Penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	100	100
9	Persentase Kebijakan Pemerintah yang telah men-include kan Agenda Pengarusutamaan Gender dan Anak	%	50	1,78	50	50
10	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi	%	50	70	55	60
11	Persentase Jumlah Tenaga Kerja dibawah Umur	%	0,024	NA	0,024	0,024
12	Persentase ketersediaan dokumen pelaksanaan Kabupaten Layak Anak	%	100	25	100	100
13	Persentase Usulan Musrenbang Anak Yang Ditindak Lanjuti	%	20	3,62	20	20
<b>2.09</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b>					
1	Persentase Gapoktan yang mendapatkan sarana dan prasarana kedaulatan dan kemandirian pangan	%	4	3,54	4	4
2	Persentase Ketersediaan Cadangan Pangan Daerah	%	30	39,67	35	40
3	Persentase KWT Yang mengikuti pelatihan diversifikasi (Penganekaragaman) Pangan	%	62,84	56,25	65,54	69,59
4	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)		88,9	88,3	90,9	93
5	Persentase wilayah/daerah yang rentan kerawanan pangan	%	50	8,85	55	60
6	Persentase Pengawasan Mutu Keamanan Pangan	%	90	100	90	90
<b>2.10</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b>					
1	Persentase Izin Lokasi Untuk Kepentingan Umum yang dikeluarkan Oleh Pemerintah Daerah	%	100	NA	100	100
2	Persentase Luas Lahan Untuk Kepentingan Umum yang dibebaskan Oleh Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100
3	Persentase Pelaksanaan Redistribusi Tanah Abstenetee Oleh Pemerintah Daerah	%	100	NA	100	100
4	Cakupan Wilayah Layanan Pemakaman (Per Kecamatan)	%	100	100	100	100



NO	Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Asumsi Capaian Tahun 2022	Target Tahun 2023
			2021	2021		
5	Persentase Pengelolaan Tanah kosong Kabuptaen	%	100	NA	100	100
<b>2.11</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>					
1	Persentase Kerusakan Lingkungan yang tertangani	%	60	61,95	70	80
2	Persentase RTH Publik yang dipelihara dan dikembangkan dengan baik	%	100	100	100	100
3	Persentase Limbah B3 yang tertangani	%	35	54.06	40	45
4	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	%	87,93	100	90,2	91,02
5	Persentase Kelembagaan lingkungan yang terbina	%	100	NA	100	100
6	Persentase penanganan pengaduan pelanggaran LH yang tertangani	%	100	100	100	100
7	Persentase sampah yang tertangani	%	45	46,57	50	55
<b>2.12</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>					
1	Persentase Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga	%	85	71	85	90
2	Persentase Cakupan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk	%	85	91,86	85	90
3	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	%	85	47,91	85	90
4	Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran	%	85	96,25	85	90
5	Persentase Penerbitan Akte Kematian	%	85	215,11	85	90
6	Persentase ketersediaan Data Base Kependudukan	%	100	100	100	100
7	Persentase Ketersediaan Profil Penduduk dan Catatan Sipil	%	100	100	100	100
<b>2.13</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>					
1	Persentase kawasan pedesaan yang dibentuk	%	60	60	80	100
2	Persentase Fasilitasi dan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa	%	85,37	87,48	91,46	100





NO	Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Asumsi Capaian Tahun 2022	Target Tahun 2023
			2021	2021		
3	Persentase Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Desa dan Lembaga Adat Desa	%	100	100	100	100
<b>2.14</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>					
1	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa	%	100	100	100	100
2	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	%	87	58,59	88	89
3	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dibidang pengendalian penduduk	%	100	98,68	100	100
4	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet need)	%	6,48	12,57	5,47	4,46
5	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	20	10,61	21	22
6	Cakupan anggota bina keluarga balita (BKB) ber-KB	%	90,9	71,37	93,4	95
7	Cakupan anggota bina keluarga lansia (BKL) ber-KB	%	75	7,16	76,5	78
8	Cakupan anggota bina keluarga Remaja (BKR) ber-KB	%	86	46,79	87	88
<b>2.15</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>					
1	Persentase Fasilitas LLAJ Yang Berfungsi Baik	%	70	65	80	100
2	Persentase Layanan Angkutan Umum	%	50	50	65	70
3	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan Yang Berfungsi Baik	%	70	66,67	85	100
4	Persentase Izin Trayek	%	0,001	0,00005	0,001	0,001
5	Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan	%	8	8	10	10
6	Uji Kir Angkutan Umum	%	100	54,1	100	100
7	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Angkutan Laut	%	80	75	90	100
8	Sarana dan Prasarana Angkutan Laut	%	100	80	100	100
<b>2.16</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>					
1	Tingkat Kepuasan Masyarakat dalam layanan komunikasi dan informasi public	%	65	72,73	70	75



NO	Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Asumsi Capaian Tahun 2022	Target Tahun 2023
			2021	2021		
2	Persentase OPD termasuk Kecamatan, Desa/Kelurahan yang terlayani akses Internet	%	41,07	45,22	58,92	79,76
3	Persentase sistem aplikasi pemerintahan dan layanan publik yang terintegrasi	%	81	86,36	86	100
<b>2.17</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>					
1	Persentase koperasi yang aktif	%	73,42	25,45	74,32	76,58
2	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	75	16,52		85
3	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	80	16,52	90	100
4	Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	25	13,39	30	35
5	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	25	13,39	30	35
6	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	25	40,18	30	35
7	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	%	25	NA		NA
8	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kielembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	25	11,16	74,32	NA
9	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	%	30	0,07	35	40
10	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	75,21	0,28	76,35	78,33
11	Persentase pertumbuhan wirausaha pemula	%	1,7	0,07	1,8	1,9
12	Persentase pertumbuhan koperasi dan usaha kecil menengah	%	0,05	0,07	0,05	0,05



NO	Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Asumsi Capaian Tahun 2022	Target Tahun 2023
			2021	2021		
<b>2.18</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>					
1	Nilai Investasi Berskala Nasional	Milyar	90	43,278	90	90
2	Persentase Peningkatan Jumlah Investor berskala Nasional	%	12	608	13	14
3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	Nilai	B	B	B	B
4	Persentase Peningkatan Nilai Investasi Berskala Nasional	%	10	-58,56	11	12
5	Persentase Ketersediaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	%	100	100	100	100
<b>2.19</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>					
1	Persentase lembaga kepemudaan yang aktif	%	59,5	95,8	61	62,5
2	Persentase Wirausaha Muda	%	37,65	57,2	39,3	40,95
3	Cakupan Binaan olahraga	%	84,67	100	91,68	98,69
4	Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi	%	74	100	74,5	75
5	Cakupan pembinaan atlet muda	%	84	25,04	85,5	87
<b>2.20</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>					
1	Persentase Ketersediaan data statistik sektoral per tahun	%	66,6	72,73	80,9	83
<b>2.21</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>					
1	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	%	12	27,3	24	30
<b>2.22</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>					
1	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Kebudayaan	%	60	87.50	60	60
2	Persentase Partisipasi masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	%	25	71.43	25	25
3	Persentase Sejarah lokal yang dikembangkan	%	15	50	15	15
4	Persentase cagar budaya yang dikelola	%	25	27.27	87	87
<b>2.23</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN</b>					
1	Persentase Pengunjung perpustakaan pertahun	%	0,81	0,62	0,87	0,89
2	Persentase Perpustakaan dalam Kondisi Baik	%	100	95,78	100	100
3	Persentase Perpustakaan Yang dikelola	%	15,59	10,92	64	31,19



NO	Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Asumsi Capaian Tahun 2022	Target Tahun 2023
			2021	2021		
<b>2.24</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN</b>					
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	100	100	100	100
2	Persentase Arsip yang dimusnakan	%	70	49,47	75	80
<b>3</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>					
<b>3.25</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN PERIKANAN</b>					
1	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	%	65	18	70	75
2	Persentase Produksi Perikanan	%	100	104,98	100	100
3	Persentase Produksi perikanan kelompok nelayan	%	100	69,65	100	100
4	Cakupan Bina Kelompok Pembudidaya	%	19,21	15,29	20,66	27,96
5	Persentase Produksi Budidaya	%	100	116,42	100	100
6	Persentase Produksi Garam Bahan Baku Industri	%	2	2,02	2	2
7	Persentase Produksi Garam Konsumsi	%	98	3,554	98	98
8	Cakupan Bina Kelompok Pengolah Hasil Perikanan	%	17,65	28,57	21,62	22,5
<b>3.26</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA</b>					
1	Persentase Kunjungan Wisata	%	95,31	316,02	95,58	95,65
2	Persentase destinasi pariwisata yang ada dalam RIPDA yang dikembangkan	%	16,88	9,46	19,48	23,38
3	Persentase peningkatan promosi dan pemasaran Pariwisata	%	19,48	11,11	23,38	25,97
4	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif Yang Mendapatkan Pembinaan	%	45,45	37,97	54,44	63,64
<b>3.27</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>					
1	Persentase Kelompok Tani yang Mendapatkan Bantuan Sarana Pertanian	%	7.02	14,83	7.09	7.16
2	Persentase Kelompok Tani yang Mendapatkan Bantuan Prasarana Pertanian	%	1.29	1,38	1.32	1.32
3	Persentase Angka Kesembuhan Hewan Ternak	%	80	80	80	80
4	Persentase Produk Hewan Yang memenuhi syarat	%	75	75	75	75
5	Persentase Ternak yang diobati	%	90	90	90	90
6	Persentase Penurunan Serangan OPT	%		-		40
7	Cakupan Kelompok Tani yang dibina	%	2.49	16,22	2.54	2.54



NO	Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Asumsi Capaian Tahun 2022	Target Tahun 2023
			2021	2021		
8	Persentase kelompok tani yang telah memiliki SKT	%	62,42	52,22	63,04	63,04
9	Persentase Ketersediaan Penyuluh Pertanian	%	85,84	85,84	85,84	85,84
<b>3.30</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>					
1	Persentase Penerbitan Izin Perdagangan	%		100	100	100
2	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal	%	38,11	0,04	40,5	42,13
3	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	%	100	100	100	100
4	Persentase Produk Unggulan Daerah yang di Pamerkan	%	25	32	25	25
5	Persentase Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya yang diuji	%	47,32	22,26	47,32	47,32
6	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Potensi Perdagangan	%	100	100	100	100
<b>3.31</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>					
1	Persentase Kelompok IKM yang mendapatkan bantuan	%	22,64	24,81	24,69	26,94
2	Persentase Kelompok IKM yang mengikuti Pelatihan	%	11,86	15,19	12,55	13,1
3	Persentase Penerbitan Izin Perindustrian	%	100	100	100	100
4	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Potensi IKM	%	100	100	100	100
<b>3.32</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI</b>					
1	Persentase transmigrasi swakarsa	%	7,5	65,5	7,5	7,5
<b>4</b>	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>					
<b>4.01</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>					
1	Cakupan Potensi Daerah Yang dipamerkan	%	100	NA	100	100
2	LKPJ Tepat Waktu	Nilai	B	B	B	B
3	Nilai LPPD	Nilai	B	B	B	B
4	Persentase Capaian 1000 Hafidz	%	80	100	100	100
5	Persentase Penyelesaian Perkara Hukum Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100
6	Persentase Batas Wilayah Yang Dipetakan	%	4	100	4	4
7	Persentase Penyelesaian Rancangan Keputusan Kepala Dearah Menjadi Keputusan Kepala Daerah	%	100	100	100	100
8	Persentase Penyelesaian Ranperda Menjadi Perda	%	100	100	100	100



NO	Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Asumsi Capaian Tahun 2022	Target Tahun 2023
			2021	2021		
9	Persentase Penyelesaian Ranperkada Menjadi Perkada	%	100	100	100	100
10	Inflasi Daerah		<4	0,51	<4	<4
11	Persentase Data dan Informasi Bidang SDA Yang digunakan dalam Perumusan Kebijakan	%	75	NA	80	80
12	Persentase Pelaporan Kegiatan pembangunan Yang dilaksanakan sesuai standar	%	30	NA	32,73	32,73
13	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pemerintahan	%	100	NA	100	100
14	Persentase proses pengadaan barang dan jasa yang melalui UKPBJ	%	100	98,95	100	100
<b>4.02</b>	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>					
1	Persentase Anggota DPRD yang mengikuti bimbingan dan pelatihan	%	100	100	100	100
2	Persentase ranperda dalam prolegda yang diselesaikan	%	100	100	100	100
<b>5</b>	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>					
<b>5.01</b>	<b>PERENCANAAN</b>					
1	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%	100	100	100	100
2	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	%	100	100	100	100
3	Persentase Kesesuaian Capaian Kinerja Sektor Pembangunan Bidang Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah	%	62,5	58,22*	71,43	80,36
4	Persentase Kesesuaian Capaian Kinerja Sektor Pembangunan Bidang Sosial Dan Ekonomi	%	80,2	74,81	84,7	85
<b>5.02</b>	<b>KEUANGAN</b>					
1	Persentase Dokumen Penganggaran yang disusun tepat waktu	%	100	100	100	100
2	Persentase Kesesuaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan yang diakomodir dalam APBD Tahun Berkenaan	%	100	106,44	100	100
3	Persentase OPD yang Menyampaikan Laporan Keuangan Tepat Waktu	%	100	100	100	100
4	Persentase Aset Tetap Tanah dan Bangunan yang dimanfaatkan	%	90	100	100	100
5	Persentase Realisasi Pajak Daerah	%	84,89	84,36	9,17	11,01
<b>5.03</b>	<b>KEPEGAWAIAN</b>					





NO	Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Asumsi Capaian Tahun 2022	Target Tahun 2023
			2021	2021		
1	Persentase Jabatan Administrasi Yang Terisi Pada Instansi Pemerintah	%	80	3,21	85	90
2	Persentase Jabatan Pimpinan Tinggi Yang Terisi Pada Instansi Pemerintah	%	100	100	100	100
3	Persentase Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Yang Terisi Pada Instansi Pemerintah	%	80	71,31	85	90
<b>5.04</b>	<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>					
1	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	25	0,01	30	35
<b>5.05</b>	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>					
1	Persentase implementasi rencana kelitbangan	%	45	16,67	60	75
2	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	%	52,73	52,73	82,73	84,33
3	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	90	90	90	90
4	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	%	52,73	52,73	82,73	84,33
<b>6</b>	<b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>					
<b>6.01</b>	<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>					
1	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Yang dilaksanakan	%	100	100	100	100
2	Persentase Ketersediaan Dokumen Peningkatan Kapabilitas APIP	%	100	100	100	100
3	Persentase Pendampingan, Asistensi, Review dan Evaluasi yang dilaksanakan	%	90	91,3	95	100
<b>7</b>	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>					
<b>7.01</b>	<b>KECAMATAN</b>					
1	Indeks Pelayanan Kecamatan	Nilai	B	B	B	B
2	Persentase Kelompok Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	%	100	100	100	100
3	Persentase Sarana Prasarana Desa/Kelurahan	%	100	100	100	100
4	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban	%	100	100	100	100
5	Indeks Pelayanan Kecamatan	Nilai	B	B	B	B
6	Persentase Ketersediaan Laporan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Desa/Kelurahan	%	100	100	100	100
<b>8</b>	<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>					
<b>8.01</b>	<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>					



NO	Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Asumsi Capaian Tahun 2022	Target Tahun 2023
			2021	2021		
1	Indeks Kesadaran Bela Negara dan Pembauran Kebangsaan	%	100	100	100	100
2	Indeks Ketahanan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	%	100	NA	100	100
3	Persentase Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pemilu	%	100	91,75	100	100
4	Persentase Cakupan Organisasi Kemasyarakatan yang diberdayakan dan diawasi	%	20	71	20	35
5	Cakupan Jumlah Konflik Antar Umat beragama dan etnis yang tertangani	%	100	80	100	100
6	Persentase Penanganan Penyalahgunaan Narkoba	%	100	61,11	100	100
7	Persentase Penurunan Jumlah Konflik di lingkungan Masyarakat	%	100	95,5	100	100
<b>URUSAN PENUNJANG</b>						
1	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	B	B	B	B
2	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	B	C	B	B
3	Nilai SAKIP	Nilai	BB	B	BB	BB
4	Persentase Acara/Kegiatan Pemda Yang tertata	%	85	NA	85	90
5	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya	%	100	NA	100	100
6	Persentase Kebijakan dan Kegiatan Pemkab Yang Dipublikasikan	%	100	NA	100	100
7	Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	NA	100	100
8	Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana Anggota DPRD	%	100	NA	100	100
9	Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana Rumah Jabatan	%	100	NA	100	100
10	Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	NA	100	100
11	Persentase Pelaksanaan Dialog Audiens dengan Masyarakat	%	100	NA	100	100

Sumber Data: RPJMD Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2023

#### **D. Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)**

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. SPM ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal kemudian lebih teknis dijelaskan dalam Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang diterapkan



berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran.

Mekanisme penerapan SPM tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian tetapi mengutamakan penerapan SPM dengan berdasarkan: (i) pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis; (ii) perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar; (iii) penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan (iv) pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar yang kesemuanya itu dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas :

1. Pendidikan.
2. Kesehatan.
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
6. Sosial

Untuk indikator kinerja SPM dapat dilihat pada tabel berikut:

**Capaian dan Target Indikator Pencapaian Standar Pelayanan Minimal  
(SPM) Kabupaten Jeneponto Tahun 2021 - 2023**

No	Indikator	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	Asumsi Capaian 2022	Target Tahun 2023
<b>1</b>	<b>PENDIDIKAN</b>					
1	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	%	100	102,29	100	100
2	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	100	104,75	100	100
3	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	%	100	12,43	100	100
<b>2</b>	<b>KESEHATAN</b>					
	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) Sesuai Standar	%	100	74.58	100	100
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	%	100	86.57	100	100
	Persentase Jumlah Bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	%	100	89.27	100	100
	Cakupan Balita (0-59 Bulan) yang mendapat pelayanan kesehatan balita sehat sesuai standar	%	100	74.61	100	100



No	Indikator	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	Asumsi Capaian 2022	Target Tahun 2023
	Cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	%	100	76,25	100	100
	Persentase pengunjung usia 15-59 tahun yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	59,93	100	100
	Persentase pengunjung berusia 60 Tahun keatas yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	36.76	100	100
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	66.23	100	100
	Persentase penyandang diabetes mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	69.16	100	100
	Persentase penderita gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jiwa promotif prevensif sesuai standar	%	100	37.57	100	100
	Persentase yang mendapatkan TB sesuai standar	%	100	47.79	100	100
	Persentase Orang yang beresiko terinfeksi HIV yang datang ke fasilitas pelayanan kesehatan dan mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	%	100	53.79	100	100
<b>3</b>	<b>PEKERJAAN UMUM</b>					
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	%	100	83,27	100	100
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	100	96,1	100	100
<b>4</b>	<b>PERUMAHAN RAKYAT</b>					
	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	70	100	100	100
	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	%	100	100	100	100
	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	%	100	100	100	100
<b>5</b>	<b>KETENTRAMAN KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>					
	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Akibat Dari Penegakan Hukum Perda Dan Perkada	%	100	85	100	100
	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	%	100	100	100	100
	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	%	100	100	100	100
	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana	%	100	100	100	100
	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran	%	100	80	100	100
<b>6</b>	<b>SOSIAL</b>					



No	Indikator	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	Asumsi Capaian 2022	Target Tahun 2023
	Terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	%	100	35.40	100	100
	Terpenuhinya kebutuhan dasar anak terlantar di luar panti	%	100	88.89	100	100
	Terpenuhinya kebutuhan dasar lanjut usia terlantar di luar panti	%	100	18.86	100	100
	Terpenuhinya kebutuhan dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis	%	100	100	100	100
	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana	%	100	100	100	100

Sumber Data: RPJMD Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2023

### E. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Berdasarkan amanah Peraturan Pemerintah nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Untuk indikator kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dapat dilihat pada tabel berikut:

#### Penetapan Target Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kabupaten Jeneponto Tahun 2023

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2023
1	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	%	89.52
2	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	KK	782,136
3	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	Rupiah	16,215
4	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	Rupiah	106,789,091,809
5	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	%	7.37
6	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	Lokasi	15
7	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	Poin	142.2
8	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Rupiah	156,094,311,815
9	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	%	12.44



<b>NO</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET TAHUN 2023</b>
10	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	%	86
11	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	%	100
12	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	%	53.55
13	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	%	88.7
14	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	%	10
15	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	Orang	61
16	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	Jiwa	0
17	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	%	81
18	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	%	18.8
19	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	%	37.2
20	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	%	15
21	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	%	75
22	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	%	84.4
23	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	%	61.8
24	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	%	55
25	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	%	79.55
26	Angka Partisipasi Kasar (APK) MP/MTs/ sederajat.	%	75.17
27	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	%	3.6
28	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	%	27.9
29	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	%	29



<b>NO</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET TAHUN 2023</b>
30	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	%	0.19
31	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	%	0.0028
32	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	%	36
33	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	%	82
34	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	%	5.6
35	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	%	20
36	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	%	19
37	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	%	100
38	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	%	86
39	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	%	69.8
40	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	%	86
41	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	%	15
42	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	%	13
43	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	%	6.87
44	Persentase tenaga kerja formal.	%	58
45	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	%	2
46	Upah rata-rata per jam pekerja.	Rp	43
47	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.		22.27
48	Tingkat setengah pengangguran.		37
49	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	%	3
50	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	%	13
51	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.	%	0





<b>NO</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET TAHUN 2023</b>
52	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	Dok	8
53	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	%	44
54	Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan.		7.93
55	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.		18
56	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	%	11
57	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	%	19
58	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.		13
59	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	%	19
60	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	%	91
61	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	%	79
62	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	%	30
63	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	%	0
64	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	%	0
65	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	%	7
66	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	%	24
67	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	%	25.32
68	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	%	0
69	Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet.	%	100

Sumber Data: RPJMD Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2023